

**IMPLEMENTASI PENGHEMATAN BIAYA ANGGARAN BERBASIS
KINERJA DENGAN AKUNTABILITAS
(STUDI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

ANGELA MARICI NGARA

Nim: 2018110216

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2023**

RINGKASAN

Peranan penghematan biaya anggaran berperan penting untuk meningkatkan kinerja karyawan yang akuntabilitas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi proses penyusunan anggaran berbasis kinerja, efektivitas proses anggaran berbasis kinerja dan pengaruh evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas. Jenis penelitian yaitu kualitatif. Data yang digunakan yaitu wawancara dengan kepala sub bagian perencanaan dan keuangan Dinas Perhubungan Kota Malang dan laporan keuangan Kota Malang dari tahun 2020-2022. Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa implementasi proses penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kota Malang dinyatakan baik karena adanya pertimbangan dan perhitungan yang matang dalam penyusunan anggaran dari kebutuhan setiap seksi bidang kerja. Efektivitas proses anggaran berbasis kinerja di Kota Malang tahun 2020 sebanyak 85,44% artinya tidak efektif karena nilai persentase antara $< 90\%$ atau $> 100\%$, hal ini terjadi karena dampak pandemi Covid-19 sehingga kegiatan anggaran tidak sesuai dari yang direncanakan, sedangkan tahun 2021 didapatkan persentase sebesar 95,62% dan tahun 2022 sebesar 92,64%, artinya efektivitas proses anggaran berbasis kinerja dinyatakan efektif karena persentase antara 90 - 100%, sehingga pemerintah Kota Malang mampu menganggarkan keuangan daerah dengan baik. Pengaruh kinerja terhadap akuntabilitas pemerintah Kota Malang dalam mengelola keuangan daerah sudah baik, karena kinerja pemerintah dalam pengelola keuangan daerah sudah sesuai prosedur sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Biaya Anggaran, Implementasi, Kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penganggaran dengan basis kinerjanya menjadi fokus sebagai kinerja yang menjadi target yang tercapai yang nantinya penggunaan akan sarana yang tersedia yaitu anggaran. Anggaran yang disusun menjadi konsep yang terbilang sudah tidak ditekankan lagi terhadap pertimbangannya sebagai sumber dayanya termasuk input yang tersedia, akan tetapi pertimbangan akan kelebihan untuk target pada kinerja yang nantinya dicapai dan melalui penggeseran akan fokus tersebut diharapkan terciptanya keefesiensian dan juga keefektifannya akan pelaksanaan dari kegiatan melalui penggunaan akan input yang telah tersedia. Selain melakukan peningkatan efisiensi dan juga efektifitasnya dalam hal melakukan pelaksanaan penganggaran pemerintah yang basisnya kinerja dengan harapan peningkatan pertanggungjawaban akan kinerja dari pemerintah dalam melakukan sistem anggaran yang basisnya kinerja menggunakan kedua sudut pandang yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Sudut pandang dari atas bawahnya dengan artian perencanaan penganggaran yang dilakukan oleh yang memegang tertinggi kebijakan yang nantinya setiap unitnya dilaksanakan penggunaan kegiatan dalam hal ini menghasilkan pengeluaran.

Penganggaran dengan basis kinerjanya dengan cara yang nasional mampu memperlihatkan keterkaitannya dalam hal alokasi akan anggaran melalui perencanaan kerja dari pemerintah. Rencana kerja pemerintah melakukan

pembagian dalam hal target dari kinerja yang nantinya diharuskan melakukan pencapaian menuju ke dalam hal-hal yang menjadi prioritas. Target yang akan dicapai dalam hal kinerja melalui prioritasnya sebagai tanggung jawabnya dari beberapa kelembagaan dan kementerian yang nantinya sangat perlu untuk melakukan koordinasi diantaranya lembaga yang berkaitan. Melalui kinerja yang diharuskan melakukan pencapaian yang telah menjadi acuan dalam hal prioritas dan juga perincian akan fokus dan prosesnya dalam hal alokasi dari anggarannya dengan cara yang nasional berpacu pada hal yang menjadi prioritas.

Penganggaran terbilang penting dan juga mempunyai korelevanan dengan pemerintah dari daerah dikarenakan penganggaran mempunyai dampak pada kinerjanya dari pemerintah yang mempunyai keterkaitan dengan fungsinya dalam hal pemerintah untuk melakukan pemberian akan layanan untuk masyarakat. Peraturan terkait anggarannya yang berhubungan dengan kinerja dari pemerintah dari daerah untuk sekarang sudah berubah sesuai dengan UU yang menjadi turunannya dan juga termasuk peraturan lainnya. Kewenangannya yang terbilang luas nantinya akan diberikan oleh pemerintah yang dari pusat untuk pemerintah yang berada di daerah bertujuan melakukan pembangunan di daerah yang terbilang mandiri dan juga mempunyai tujuannya sehingga daerah yang terbilang mampu mendapatkan penghasilan dalam hal kualitasnya terkait kinerja untuk melakukan pengelolaan sumber daya yang terdapat di daerah yang terbilang efisiensi dan juga keefektifannya dalam hal melakukan penciptaan akan pemerintah yang terbilang baik. Hasilnya yang nantinya terdapat di daerah dalam hal pengelolaan akan sumber daya yang terdapat di daerah sehingga setiap pemda nantinya akan dilakukan

pelaporan dalam hal bentuk pelaporannya yang pada bagian akuntabilitasnya termasuk laporan pertanggungjawabannya yang telah dilakukannya dengan cara yang periodik.

Pelaporan akan akuntabilitasnya yang dilaksanakan oleh pemda menjadi wujud dari pertanggungjawaban dari daerah sebagai bentuk yang nantinya terbilang tinggi akan tuntutanannya yang asalnya dari masyarakat pada kinerjanya akan pemerintah melalui pemberian akan layanan yang berbasis publik yang terbilang baik. Anggapan pemerintah terkait keberadaan akuntabilitas sehingga nantinya dapat melakukan pemberian akan kinerja yang telah berubah di instansi pemerintah yang terbilang baik termasuk keseringan pengenalan akan istilah pertanggungjawaban akan instansi melalui kinerja dari pemerintah. Akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah sebagai wujudnya yang dari daerah pertanggungjawaban akan instansi dalam hal pelaksanaannya akan organisasi untuk melakukan pencapaian akan tujuan dan juga sasarannya yang nantinya akan dilakukan dengan cara yang periodik. Pemerintah telah memperoleh pemberian akan pertanggungjawaban terkait kinerjanya yang akan dilakukannya untuk masyarakat seperti informasinya melalui bentuk pelaporan pertanggungjawaban akan kinerja dari instansi yang berada di pemerintah.

Implementasi anggaran berbasis kinerja dengan singkatan ABK dengan esensinya sebagai salah satu mekanismenya dalam hal pengintegrasian akan informasi dalam hal kinerja untuk proses anggaran setiap tahunnya ataupun terhadap aplikasinya akan sumber daya yang terdapat di organisasi (Bawono, 2015). Informasi akan kinerjanya mampu diartikan menjadi informasi dalam hal

hasil yang nantinya akan dilakukan pencapaian pada kegiatan tertentu yang juga termasuk informasinya dalam hal biaya yang nantinya akan dikorbankan bertujuan melakukan pencapaian akan hasilnya tersebut (Robinson, 2011).

1.2 Fokus penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah:

- a. Implementasi Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
- b. Efektivitas Proses Anggaran Berbasis Kinerja
- c. Pengaruh Evaluasi Kinerja Terhadap Akuntabilitas

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian dengan rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana implementasi proses penyusunan anggaran berbasis kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Malang?
2. Apakah anggaran berbasis kinerja, sebagai instrumen pengawasan keuangan sudah berjalan efektif pada Dinas Perhubungan Kota Malang
3. Bagaimana evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian dengan tujuannya yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Malang
2. Untuk mengetahui bagaimana proses anggaran berbasis kinerja sebagai instrumen pengawasan keuangan sudah berjalan efektif pada Dinas Perhubungan Kota Malang

3. Untuk mengetahui pengaruh evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Kota Malang

1.5. Paradigma Penelitian

Paradigma pada penelitian ini adalah: Implementasi Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. Implementasi proses penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk mengkaji pengelolaan keuangan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah telah mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan manfaatnya yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini menjadi rujukan untuk perusahaan dalam hal melakukan penerapan akan teori hasil penelitian sebagai bentuk pengembangan ilmu untuk menjadi solusi yang akan dihadapi oleh generasi bangsa dan negara. Dan juga menjadi bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

Secara praktek untuk digunakan saat berhadapan dengan kondisi yang sesuai dengan penelitian ini dan juga memperkuat teori dalam hal prakteknya sebagai solusi dari masalah yang telah diproses oleh instansi tersebut.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Mampu dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang terbilang belum diteliti oleh peneliti, dan variabelnya dapat dilakukan pengembangan.

1.7. Ruang Lingkup Penelitian

- a. Lokasi penelitian: Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Malang beralamat di Jl.Raden Intan No.1, Polowijen, Kec. Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126.
- b. Variabel yang digunakan: variabel berganda
- c. Subjek yang dikaji: Penyusunan Rencana Anggaran (RAK), implementasi anggaran berbasis kinerja, evaluasi kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syamudi Prasetia 2012. Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Dinas Pendapatan Dipengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon).universitas Pausndan. Bandung
- Casmadi, Y dan I. Azis. (2019) Pengaruh Biaya Produksi Dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersi Pada PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 11 No. 1:41-51
- Indrihastuti, P, dan M Amaniya. (2020). Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *OPTIMA*, Vol 4 No.1
- Juliani, D., & M. Sholihi (2014). Pengaruh factor-faktor kontekstual terhadap persepian penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. *Jurnal akuntansi dan keuangan Indonesia*, 11 (2), 177-199.
- Kurohman, T. (2013). Evaluasi penganggaran berbasis kinerja keuangan yang berbasis volue for money dikabupaten/kota jawa timur. *Jurnal dinamika akuntansi*, 5(1),1-11
- Kusuma, E.A., & I. K. Budiarta. (2013). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi dan ketidakpastian lingkungan pada ketepatan anggaran (studi Empiris diSKPD pemerinta provinsi bali). *E-jurnal ekonomi dan bisnis universitas udayana*, 2(3).
- Lestari, I.P (2014). Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja (studi survey pada dinas SKPD pemerintah (Kota Bandung). Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama, Bandung
- Maisara, F.S (2014).Pengaruh akuntabilitas public, partisipasi masyarakat, transparansi public, dan APBD berbasis kinerja terhadap kualitas anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) dikota Aceh.skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda aceh.
- Marsus, S. & Mas'udin. (2020). Does the performance-based Budgeting work in indonesia?. *International journal of scientific dan technology research*. Vo. 9, Issue 02, February 2020.
- Multihartanti, M. T.(2017). Analisis penerapan penganggaran berbasiskinerja pada pemerintah kota administrasi Jakarta utara (studi kasus untuk tahun anggaran 2011). Jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mulyadi. (2014). Akuntansi Biaya. Edisi ke-5, cetakan kedua belas. UPP.STIM YKPN.
- Murhadi, W. R. (2013) . Analisis Laporan Keuangan Proyeksi Dan Valuasi Saham
- Prayudi, M. A., & H. Basuki (2014). Hubungan aspek power, penerapan sistem pengendalian administrative, akuntabilitas, dan efisiensi program. Kementrian keuangan republik Indonesia (2019). Konsep perencanaan penganggaran. Diklat perancangan dan penganggaran kementrian keuangan. Jakarta. Prospek Implementasi SAKETAP.Simposium Nasional Akuntansi XV1. Ace. 21-22 Juli

- Rahardjo, B. (2015). *Keuangan Dan Akuntansi Untuk Manajer Non Keuangan*, Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rudiantoro, R Dan S. V Siregar. (2011). *Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Salemba Empat*, Jakarta
- Sofyani dan prayudi. Implementasi anggaran In the Netherlands. *OECD journal on budgeting*, 3, 1-34
- Sugyono. 2010. *Motode penelitian bisnis*, CV.Bandung: Alfabeta, Yogyakarta